

PENINGKATAN KAPASITAS PERANGKAT DESA
DALAM PELAYANAN PUBLIK DI ERA DIGITAL DI DESA
TEMON KECAMATAN SAWOO KABUPATEN PONOROGO
TAHUN 2024

A. Latar Belakang

Di era digital saat ini hampir semua sektor dituntut untuk menerapkan sistem digitalisasi termasuk dalam sistem pemerintahan. Digitalisasi merupakan satu kata yang tidak bisa lepas dari pembahasan dunia industri. Berbagai bentuk digitalisasi sangat memudahkan setiap pekerjaan. (Araujo, Priadana, S., Paramarta, & Sunarsi, 2021) Sederhananya digitalisasi adalah proses perubahan yang terjadi pada teknologi bersifat analog ke teknologi bersifat digital. Tujuan digitalisasi tentu meningkatkan efisiensi dan efektivitas kinerja setiap bagian dari industri, sehingga waktu seluruh sumber daya yang dimiliki dapat diolah seoptimal mungkin. (Verihubs, 2022) Menurut Sukmana dalam Erwin, digitalisasi merupakan proses media dari bentuk tercetak, audio, atau video menjadi bentuk digital. Sedangkan teknologi berasal dari bahasa Yunani yaitu Technologia, suatu rancangan atau desain untuk alat bantu tindakan yang mengurangi ketidakpastian dengan hubungan sebab akibat dalam mencapai suatu hasil yang diinginkan. Perkembangan teknologi digital merupakan hasil rekayasa akal, pikiran, dan kecerdasan manusia yang tercermin dalam kemajuan ilmu pengetahuan yang

memberikan manfaat dalam segala aspek kehidupan manusia. Manfaat digitalisasi sendiri adalah untuk menyebarkan informasi, dengan begitu masyarakat semakin mudah dalam mendapatkan informasi yang diinginkan. (Wiranti & Frinaldi, 2023)

Perkembangan teknologi saat ini yang begitu pesat sehingga sangat dibutuhkannya penyesuaian terhadap teknologi demi menunjang kegiatan sehari-hari, pemerintah sebagai pemberi layanan dalam masyarakat juga harus mampu memanfaatkan teknologi demi menunjang kegiatan partisipasi. (Abd Aziz, Ab Rahman, & Alam, M. M., & Said, 2015) Digitalisasi yang telah masuk ke kehidupan sehari-hari juga banyak di manfaatkan oleh sektor swasta untuk mendapatkan keuntungan saat ini dengan mempermudah memberikan partisipasi yang bisa kita lihat di berbagai aplikasi mulai dari pengantar makanan, ojek, pesan antar barang dan jasa juga telah banyak memanfaatkan kemajuan (Aliamsyah, 2009) Manusia sebagai pengguna pasti ingin sesuatu yang mempermudah segala kegiatan, semua hal di coba untuk mengefisienkan waktu dan tenaga. Head of Strategy and Planning PHD Asia Pacific, menjelaskan lima tahap evolusi teknologi masa depan yang tumpang tindih. Tahapan perubahan muncul, mengorganisir, mengekstraksi, mengantisipasi dan mengangkat. Selama era pengembangan, yang berlangsung dari tahun 1950 hingga 1995, informasi diperoleh melalui komputer yang terhubung ke internet (Littlejohn, 2014) Pada tahap kedua, yang dikenal sebagai Organize (1990-2015), pengguna teknologi

mengorganisir materi dari Internet yang dapat diakses di seluruh dunia dan memiliki nilai tambah yang luas. Fase Unbundling, yang berlangsung dari tahun 2010-2025, ditandai dengan penggunaan gadget pintar, Internet of Things, kecerdasan buatan, dan asisten virtual untuk mempercepat komunikasi global. Pada tahap keempat, yang dijuluki Foresight (2020-2035), sistem kecerdasan buatan dapat belajar lebih dalam dan memahami keinginan masyarakat. Pengenalan teknologi yang mendukung kecerdasan buatan yang dapat mengubah cara orang berinteraksi akan menentukan fase kelima, yang dijuluki Lifting 2030-2050 (Reza, 2017)

Banyak profesi yang berbeda dipengaruhi oleh teknologi, dan beberapa pekerjaan akan tergantikan. Sembilan pekerjaan, termasuk pengemudi, petani, penerbit/cetak, agen perjalanan, kasir, pegawai bank, telemarketer, akuntan, dan pialang saham, diprediksi akan gulung tikar di masa (Astomo, 2014) Perkembangan teknologi juga berdampak langsung kepada kegiatan administrasi kantor di lembaga pemerintahan, Karena teknologi selalu berubah dan bahkan revolusioner, kantor harus terus beradaptasi dan menggunakannya. Paradigma partisipasi publik sedang berubah, dengan menempatkan lebih banyak fokus pada manajemen yang berfokus pada pelanggan (pemerintah yang digerakkan oleh kebutuhan warganya), yang sejalan dengan evolusi administrasi negara untuk mencapai partisipasi yang baik dan berkualitas tinggi. Tindakan memberikan kenyamanan dan layanan kepada masyarakat dalam rangka membantu

masyarakat memenuhi kebutuhannya demi efektivitas, efisiensi, dan pemangkasan biaya (Suwondo, 2011)

Partisipasi publik harus mampu memberikan pelayanan yang prima karena tuntutan dari masyarakat yang menginginkan pelayanan harus bisa secara cepat, efektif dan efisien. Seorang birokrasi harus memiliki jiwa melayani dengan cara kerja yang lebih fleksibel dan berorientasi dialogis serta cara kerja yang lebih pragmatis dan realistis, yang Merujuk pada Pasal 23 ayat (1) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, disebutkan bahwa "Dalam rangka memberikan dukungan informasi terhadap penyelenggaraan pelayanan publik perlu diselenggarakan Sistem Informasi yang bersifat nasional" (RI, 2009) Sementara di Pasal 23 ayat (4) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik Penyelenggara berkewajiban mengelola Sistem Informasi yang terdiri atas Sistem Informasi Elektronik atau Non elektronik yang sekurang kurangnya meliputi; profil penyelenggara, profil pelaksana, standar pelayanan, maklumat pelayanan, pengelola pengaduan dan penilaian kinerja. Secara eksplisit terhadap topik partisipasi publik di dalam kebijakan, khususnya pada diskusi tentang elemen pendorong partisipasi tersebut. (Damanik, 2016) Selain karena pembahasan partisipasi masyarakat yang masih terfragmentasi, sebagian besar studi menempatkan partisipasi pada konteks peran warga sebagai salah satu pihak yang mampu mengimplementasikan kebijakan. Keadaan ini mengasumsikan bahwa partisipasi telah terbentuk secara final dan belum mengeksplorasi lebih

jauh adanya ragam permasalahan pada tataran hulu seperti aksesibilitas ataupun aspek sumber daya pendukung partisipasi. Padahal pemahaman mengenai partisipasi sendiri berkaitan erat dengan isu redistribusi kuasa kepada warga agar mampu secara aktif terlibat dalam setiap proses kebijakan sesuai dengan basis kebutuhan mereka. (Lim, Edelenbos, & Gianoli, 2019).

Kebutuhan untuk terus mengangkat isu partisipasi publik dalam kebijakan pembangunan perkotaan sangat diperlukan karena kota bukanlah ruang mati yang hanya disusun oleh infrastruktur fisik saja. Keberadaan kota sangat terikat oleh sekelompok individu yang bermukim, mendiami, serta beraktivitas di dalamnya yang menciptakan nilai-nilai serta interaksi antarmanusia (Suntoro & Hariri, 2015). Mengarusutamakan diskursus partisipasi publik artinya memberikan upaya pada terbentuknya ruang kota yang lebih inklusif serta menghindari tercerabutnya kepentingan organik masing-masing penduduknya. Partisipasi membuka kemungkinan bagi warga untuk mendobrak dominasi kapital dari proses industrialisasi yang bergeliat di kota (Haliim, 2016) Setiap penghuni kota mulai dari lingkup individu berkesempatan untuk mendefinisikan ulang bentuk perjuangan atas produksi ruang kota berdasarkan kebutuhan bersama. Pengamatan dinamika partisipasi publik dapat dijadikan pintu masuk untuk menelisik persoalan sistematis yang menjangkiti upaya partisipasi itu sendiri, baik dari aspek ketimpangan sumber daya yang dimiliki oleh masyarakat maupun kapasitas politik pemerintah dalam mengimplementasikan gagasan-gagasan yang bersifat kolaboratif

(Butler, 2012)

Teknologi yang mempunyai peran penting untuk meningkatkan standar layanan, partisipasi publik secara digital bisa sangat membantu masyarakat untuk mendapatkan informasi maupun layanan secara cepat sehingga mampu untuk menciptakan kualitas layanan yang unggul. (Nurhakim, 2014) Pemerintah dapat menggunakan kemampuan digital untuk meningkatkan efisiensi partisipasi publik, memperluas keterlibatan warga negara dalam pengambilan keputusan, dan meningkatkan keterbukaan dan akuntabilitas. Dengan menerapkan e-government, mempromosikan keterampilan digital karyawan, dan menggabungkan teknologi ke dalam prosedur pengambilan keputusan, pemerintah dapat meningkatkan kemampuan digital mereka (Sawitri, 2017). Bentuk partisipasi yang telah disinggung sebelumnya dapat diklasifikasikan ke dalam partisipasi pasif yang seolah-olah melibatkan peran masyarakat dalam tata kelola kota, namun ternyata tidak memberikan dampak apapun pada perubahan strategis kebijakan (Gao, Z., Wang, S., & Gu, 2020). Khususnya untuk permasalahan fundamental tata kelola, seperti kemacetan, tingkat polusi udara, bencana banjir, ataupun aksesibilitas hunian (Li, Wang, Luo, & Li, 2018). Pada dasarnya, memberi kemungkinan bagi warga untuk dapat mengumpulkan data publik melalui bantuan teknologi tidak serta merta membuat mereka dapat bertindak secara bermakna atas data tersebut (Lim et al., 2019)

Teknologi yang mempunyai peran penting untuk meningkatkan standar layanan, dengan adanya digitalisasi bisa sangat membantu masyarakat untuk mendapatkan informasi ataupun layanan secara cepat sehingga mampu menciptakan kualitas layanan yang lebih unggul. Dengan pengaruh digitalisasi pemerintah dapat menggunakan kemampuan digital untuk meningkatkan efisiensi layanan publik, serta memperluas keterlibatan partisipasi publik dalam pengambilan keputusan tata negara.

Tujuan dari penelitian ini, untuk mengetahui efektivitas partisipasi publik dalam pengambilan keputusan tata negara melalui digitalisasi. Serta mengetahui hambatan yang dihadapi dalam mengintegrasikan partisipasi publik dalam pengambilan keputusan tata negara di era digital.

Perangkat Desa berfungsi memberikan pelayanan masyarakat antara lain ialah menyelenggarakan administrasi pemerintahan yang baik, meningkatkan kesejahteraan dari masyarakat, dan memelihara ketentraman dan ketertiban dalam masyarakat.

Di dalam memberikan pelayanan, Perangkat Desa kepada masyarakat masih terlihat banyak keluhan dari masyarakat. kecakapan dalam memberikan pelayanan adalah bagian dari masalah yang ditunjukkan di lapangan di antaranya tidak maksimal dan optimalnya pelayanan yang diberikan oleh Perangkat Desa.

Kapasitas Perangkat Desa Temon dalam pelayanan publik dapat ditinjau dari tingkat pendidikan, peningkatan SDM melalui pelatihan-pelatihan

kapasitas perangkat, kemampuan dalam mengikuti regulasi Desa, kemampuan dasar dalam memahami tugas pokok dan fungsi.

Berdasarkan tinjauan itu dapat di sampaikan bahwa dari 15 perangkat Desa terdapat 3 yang kualifikasi pendidikanya S1, sedangkan yang lain Tingkat SLTA. Dari sini dapat dipahami bahwa secara Pendidikan masih sangat terbatas. Dilihat dari sisi pelatihan, di Desa juga sangat minim adanya pelatihan-pelatihan sebagai upaya peningkatan kapasitas perangkat Desa, dalam hal pemahaman regulasi Desa juga tidak semuanya mampu mengikuti perkembangan dan tuntutan, sehingga dalam berbagai hal hanya di handle oleh beberapa perangkat saja, apalagi yang terkait dengan digitalisasi (Triyono, sekdes Desa temon, 2024)

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas maka dapat ditentukan rumusan masalah sebagai berikut :

1. Apa saja upaya yang dilakukan untuk peningkatan Kapasitas Perangkat Desa Temon Kecamatan Sawoo Kabupaten Ponorogo dalam pelayanan publik di era digital ?
2. Bagaimana Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa Temon Kecamatan Sawoo Kabupaten Ponorogo dalam pelayanan publik di era digital ?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui upaya-upaya yang dilakukan untuk peningkatan

Kapasitas perangkat Desa Temon Kecamatan Sawoo Kabupaten Ponorogo dalam pelayanan publik di era digital.

2. Untuk mendiskripsikan dan menganalisis peningkatan kapasitas perangkat Desa Temon Kecamatan Sawoo Kabupaten Ponorogo dalam pelayanan publik di era digital

D. Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian mencakup manfaat teoritis dan manfaat praktis.

1. Manfaat teoritis yaitu dengan kegiatan penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pada pengembangan keilmuan terutama dalam dunia pemerintahan tingkat Desa.
2. Manfaat praktis adalah dengan kegiatan penelitian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi kepada kegiatan penelitian berikutnya atau kepada pembuat kebijakan yang terkait dengan masalah peningkatan kapasitas Perangkat Desa.

E. Definisi Konsep

1. Pengertian Pelayanan Publik

Menurut KBBI, pelayanan publik adalah sebuah proses atau cara yang dilakukan untuk melayani masyarakat secara umum. Pelayanan publik merujuk pada segala layanan yang diberikan oleh instansi pemerintah maupun sektor publik kepada masyarakat.

Pelayanan publik tidak hanya sebatas proses administratif, namun juga mencakup interaksi dan kualitas hubungan antara penyedia layanan

dengan masyarakat. Ini melibatkan responsif, transparan, serta kesediaan untuk memberikan solusi yang efektif terhadap kebutuhan masyarakat.

2. Kapasitas Perangkat Desa

Pengembangan sumber daya aparatur dapat diartikan sebagai suatu usaha pengembangan yang memosisikan aparatur sebagai objek utama melalui usaha yang bersifat teknis, teoretis, konseptual, dan moral agar dapat meningkatkan kemampuan aparatur dan dijalankan sesuai prosedur yang sistematis (Mongilong, Singkoh, & Kairupan, 2018).

Aparatur Desa saat ini memerlukan pengembangan sumber daya untuk memperkaya kompetensi diri yang tentunya ditujukan untuk peningkatan kinerja dan hasil kinerja aparatur (Darmawan, 2013).

3. Pengertian Era Digital

Era digital adalah suatu zaman di mana teknologi informasi dan komunikasi menjadi bagian penting dalam kehidupan manusia. Menurut para ahli, era digital diawali dengan adanya kemajuan teknologi komputer dan internet pada tahun 1990-an. Sejak saat itu, teknologi informasi dan komunikasi terus berkembang dan semakin merambah ke berbagai aspek kehidupan manusia.

David Crystal, seorang ahli bahasa Inggris, mengatakan bahwa era digital adalah suatu zaman di mana informasi dan komunikasi diungkapkan dengan menggunakan teknologi elektronik. Selain itu, era digital juga ditandai dengan kecepatan dan kemudahan akses informasi serta

kemampuan untuk berkomunikasi secara global.

F. Kajian Teori

1. Peningkatan kapasitas (managemen sumber daya manusia)

Di Dalam kamus hukum dan kamus otonomi daerah, kapasitas diartikan sebagai: “kemampuan seseorang atau perseorangan, organisasi atau sistem untuk melaksanakan tugas dan tugas serta wewenangnya untuk mencapai tujuannya secara efisien dan efektif. pembangunan negara dan penguatan kapasitas pemerintah dalam rangka mendukung desentralisasi, tertulis dalam kebijakan Menteri Dalam Negeri dan direktur bappenas tahun 2002, bahwa pembangunan dan peningkatan kapasitas melibatkan tiga tingkatan, yaitu: 1) Tingkat sistem , yaitu kerangka peraturan dan kebijakan yang mendukung atau membatasi pencapaian tujuan politik tertentu. 2) Tingkat kelembagaan atau unit, yaitu struktur organisasi, proses pengambilan keputusan internal, prosedur dan mekanisme operasional, alat manajemen, hubungan dan jaringan antar organisasi) Tingkat individu, yaitu tingkat keterampilan, kompetensi, pengetahuan/pemahaman, sikap, etika dan motivasi orang-orang yang bekerja dalam organisasi.

Pada tahun 2008, Pusat Pemerintahan Daerah Sendiri melakukan kajian peningkatan kapasitas pemerintahan Desa, dengan hasil: tidak semua Desa menyiapkan dokumen zonasi; Pendapatan keuangan Desa masih sangat bergantung pada kontribusi negara; kapasitas aparat Desa dalam

membentuk politik Desa masih sangat rendah; Pengambilan keputusan kepala Desa belum berdasarkan prinsip pengelolaan modern; dan dalam pemberian pelayanan publik, kapasitas administrasi Desa terbatas (kualitas dan kuantitas sumber daya manusia perangkat Desa, sehingga mempengaruhi produktivitas dan kreativitas perangkat Desa.

Hasil survei pendahuluan yang dilakukan di Kabupaten Kudus menunjukkan bahwa keberadaan pemerintahan Desa belum dapat berfungsi secara maksimal dalam penyelenggaraan pemerintahan Desa. Salah satu faktor yang menyebabkan belum optimalnya penyelenggaraan pemerintahan Desa adalah rendahnya kapasitas perangkat Desa dibandingkan beban kerja, wilayah, dan keterampilannya yang masih sangat terbatas akibat kurangnya kepemimpinan, pelatihan, dan pendidikan. pelatihan teknis untuk meningkatkan kapasitas perangkat Desa. Potret aparat Desa sedikit menunjukkan ketidakprofesionalan, kurangnya kreativitas dan inovasi, serta masih banyak potret negatif lainnya yang pada dasarnya menunjukkan bahwa aparatur Desa masih lemah.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Metode yang dipakai dalam penelitian ini adalah metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Penelitian kualitatif menurut Moeleong (2017) adalah penelitian yang dimaksudkan untuk memahami

fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, Tindakan dan lain-lain secara holistic dan dengan suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode ilmiah.

2. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah Desa Temon Kecamatan Sawoo Kabupaten Ponorogo.

3. Teknik Penentuan Informan

Informan dalam penelitian ini merujuk pada kelompok orang yang terdapat pada suatu instansi atau lembaga, dalam penelitian ini peneliti menggunakan Teknik Purposive sampling yaitu cara penentuan informan yang ditetapkan secara sengaja atas dasar kriteria atau pertimbangan tertentu. Teknik pengambilan informan adalah merupakan cara yang digunakan dalam hal memperoleh data primer untuk bahan penelitian.

Dalam penelitian ini, peneliti menentukan informan untuk penggalan informasi meliputi :

1. Kepala Desa Temon
2. Sekertaris Desa Temon
3. Kasi Pelayanan Desa Temon
4. Operator Desa Temon
5. Masyarakat Desa Temon

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data primer adalah pengumpulan data yang dilakukan secara langsung pada lokasi penelitian. Data kualitatif berbentuk deskriptif. Berupa kata-kata lisan atau tulisan tentang tingkah laku manusia yang dapat diamati. Pengumpulan data primer dapat dilakukan melalui :

- a. Teknik observasi yaitu pengumpulan data dengan pengamatan secara langsung obyek penelitian dengan cara mencatat segala gejala yang di temukan dilapangan untuk mempelajari data-data yang diperlukan sebagai acuan yang berkenaan dengan topik penelitian. sebelum turun kelapangan peneliti menyusun pedoman obsevasi.
- b. Teknik wawancara, yaitu proses pengumpulan data yang dilakukan secara langsung dengan pihak terkait untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan dengan cara melakukan tanya jawab sambil bertatap muka antara pewawancara dengan informan. Metode ini dilakukan dengan cara mengajukan pertanyaan-pertanyaan secara langsung dan terbuka kepada informan atau pihak yang berhubungan dengan penelitian. Sebelum turun ke lapangan peneliti terlebih dahulu menyusun pedoman wawancara.
- c. Teknik dokumentasi, yaitu Teknik pengumpulan data dengan menggunakan catatan-catatan atau dokumtasi-dokumentasi yang ada dilokasi penelitian atau sumber lain yang terkait dengan obyek

penelitian.sebelum turun ke lapangan terlebih dahulu Menyusun pedoman dokumentasi.

5. Teknik Analisa Data

Sesuai dengan metode penelitian, teknik analisa data yang dipergunakan dalam penelitian ini dengan menggunakan analisis kualitatif. Teknik analisis dan penafsiran data yang digunakan dalam penelitian ini mengikuti langkah-langkah yang direkomendasikan Miles dan Huberman (2014), yang lazim disebut dengan interactive model. Teknik analisis ini pada dasarnya terdiri dari tiga komponen, yaitu reduksi data, penyajian data dan penarikan serta pengujian kesimpulan dengan melakukan analisis terhadap masalah yang ditemukan dilapangan sehingga diperoleh gambaran yang jelas tentang obyek yang diteliti dan menarik kesimpulan.

Dalam melakukan analisis data, terdapat beberapa tahapan antara lain :

a. Pengumpulan Data

Bagian pertama dari analisis data yaitu pengumpulan data, Dimana dalam tahap ini peneliti melakukan proses pengumpulan data dengan teknik pengumpulan data yang telah ditentukan sejak awal. Data yang diperoleh kemudian dijadikan satu untuk diolah dengan sistematis.

b. Reduksi Data.

Proses pemilihan, pemusatan pada penyerderhanaan transformasi

data kasar yang muncul dari catatan-catatan lapangan, melakukan transkrip data untuk memilih informasi mana yang dianggap sesuai dan tidak sesuai dengan masalah yang menjadi pusat penelitian di lapangan.

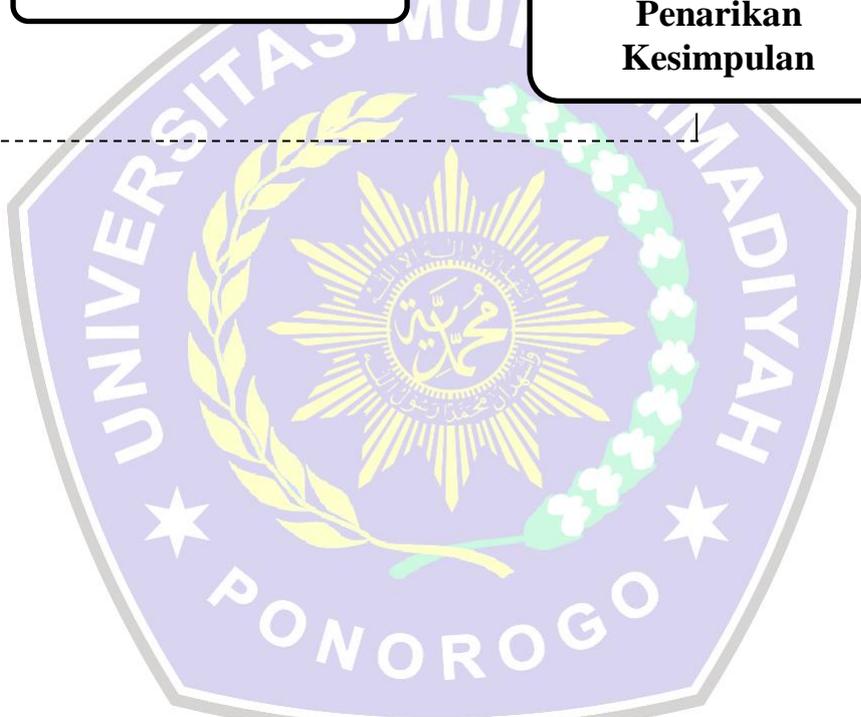
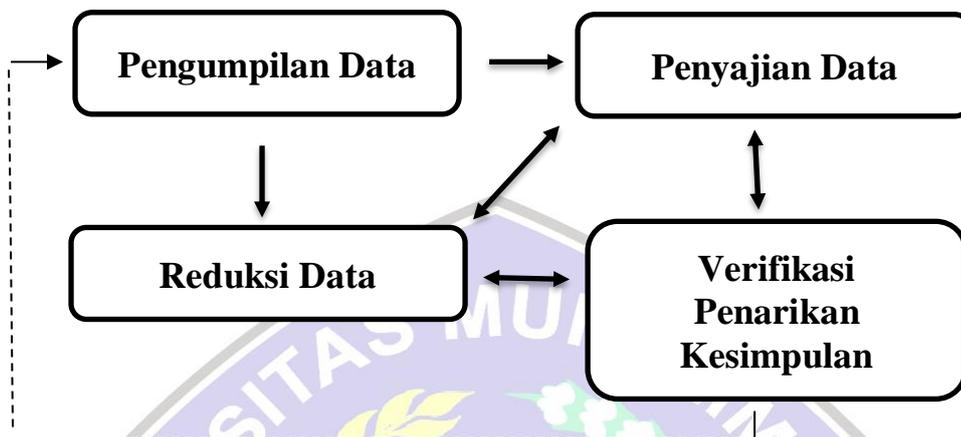
c. Penyajian data

Informasi berbentuk naratif atau uraian teks grafik, jaringan, table, dan bagan yang bertujuan mempertajam pemahaman penelitian terhadap informasi yang dipilih kemudian disajikan dalam table maupun uraian penjelasan.

d. Kesimpulan

Mencari arti pola-pola penjelasan, konfigurasi yang mungkin, alur sebab akibat, dan proposi. Penarikan kesimpulan dilakukan secara cermat dengan melakukan verifikasi berupa tinjauan ulang pada catatan-catatan lapangan sehingga data-data dapat diuji validitasnya. Berikut skema proses dalam menganalisis data bentuk miles dan hurbermen.

Skema Analisis Data





**PENINGKATAN KAPASITAS PERANGKAT DESA
DALAM PELAYANAN PUBLIK DI ERA DIGITAL DI
DESA TEMON KEC SAWOO PONOROGO**

PERLUNYA PENINGKATAN SDM

Zaman semakin maju, tuntutan semakin banyak, perangkat desa sebagai garda terdepan sebagai pelaksana pembangunan paling bawah sangat perlu peningkatan sdm agar mampu beradaptasi dan mampu perkembangan jaman sehingga pelayanan publik ditingkat desa di era digital lebih baik dan meningkat

**TANTANGAN
PELAYANAN
PUBLIK DI ERA
DIGITAL**

Terdapat dua tantangan pelayanan public di desa temon yaitu tantangan infrastruktur digital yang dapat mendukung pelayanan public diantaranya ketersediaan jaringan internet yang cukup memadai, menu informasi desa yang mudah diakses. Tantangan yang berikutnya adalah SDM, yaitu kemampuan literasi warga dalam memanfaatkan media sosial, media digital untuk mengakses berbagai informasi dan pelayanan publik

**PROSES PENINGKATAN
KAPASITAS SDM**

Proses peningkatan kapasitas SDM yang dilakukan oleh pemerintah desa temon sudah baik walaupun banyak kendala, akan tetapi banyak usaha yang telah dilakukan untuk peningkatan kapasitas SDM perangkat desa temon sawoo ponorogo

LANGKAH KONGKRIT

Langkah kongkrit yang dilakukan pemerintah desa temon adalah mengikuti, serta menyelenggarakan berbagai pelatihan dan bimbingan teknis sesuai peraturan perundang – undangan yang berlaku, mengikuti program digital (smart village), melaksanakan publikasi kegiatan desa, mengikuti paralegal desa di kabupaten malang tahun 2023, menyelenggarakan peningkatan UMKM dan membuat web desa.



BAB III

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan teori yang dijadikan landasan dalam penyusunan karya tulis ini dapat disimpulkan bahwa dalam rangka peningkatan kapasitas perangkat desa dalam pelayanan publik perlu mendapatkan perhatian khusus, karena sudah menjadi sebuah tuntutan dengan perputaran perkembangan zaman yang semakin maju.

Untuk bisa meningkatkan pelayanan publik di era digital sangat dibutuhkan peningkatan SDM dan Sumber Daya Dukung lainnya, seperti alat dan jaringan internet untuk mengakses semua informasi di media sosial.

Pemerintah Desa Temon sudah melakukan Upaya-upaya peningkatan kapasitas perangkat desa walaupun belum maksimal dalam pelaksanaannya akan tetapi walaupun demikian pemerintah Desa Temon masih terus berupaya meningkatkan kapasitas dan pelayanan publik kearah yang lebih baik sesuai dengan tuntutan dan perkembangan zaman.

Adapun beberapa upaya peningkatan kapasitas perangkat Desa Temon yang telah dilakukan adalah terus mengikuti perkembangan informasi, selalu koordinasi antar desa dan melakukan peningkatan SDM baik secara mandiri maupun berkelompok sesuai tupoksi perangkat desa. Disamping itu pada bulan desember 2023 mengikut sertakan perangkat Desa dan BPD dalam kegiatan peningkatan kapasitas perangkat dan BPD di kota malang yang diselenggarakan oleh pemerintah kecamatan melalui forum koordinasi antar Desa se kecamatan sawoo.

B. SARAN

Zaman semakin maju, informasi yang semakin mudah di akses sudah semestinya pemerintah desa sebagai garda terdepan dalam pembangunan perlu untuk segera beradaptasi dengan perubahan sistem, yaitu dari sistem tradisional menjadi sistem digital, diantaranya yaitu menggunakan google form , Link-link pelayanan sesuai dengan kebutuhan yang bisa di akses oleh masyarakat.

Peningkatan kapasitas SDM secara berjenjang, berkelanjutan dan berkesinambungan menjadi sebuah keharusan agar pelayanan publik lebih meningkat, disamping pembangunan infrastruktur yang harus dipenuhi secara bertahap.

Perlu kiranya adanya sebuah program khusus dalam pengembangan SDM dalam hal penguasaan media sosial, peningkatan kemampuan dalam hal IT, pelatihan-pelatihan, diklat dan berbagai bimtek lainnya, agar pemeritahan Desa Temon lebih maju, lebih meningkat dari berbagai bidang terutama dalam pelayanan publik di era digital.

